

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pengembangan pedesaan merupakan salah satu faktor tercapainya pembangunan di Indonesia, karena sebagian besar masyarakat bertempat tinggal di Pedesaan. Tercapainya suatu pembangunan menjadi hal yang sangat penting dilakukan pemerintah karena dari pembangunan dapat membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia, semakin pemerintah peduli terhadap pembangunan, akan memicu tingkat perekonomian di Indonesia. Baik dikota maupun di desa pembangunan harus merata, karena pemerataan pembangunan menuju tercapainya keadilan seluruh Rakyat Indonesia.

Desa juga mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan melalui sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pembangunan desa masyarakat merupakan subjek pembangunan yang memiliki sasaran dalam menggalang, gerakan, dan partisipasi dalam mengembangkan potensi dan aset desa.

Dalam rangka pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintah serta pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan Pemerintah Desa. Pemerintah Pusat menganggarkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya disebut Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan

dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, serta Pemberdayaan Masyarakat. Fokus utama dalam pengoptimalan Dana Desa lebih terkait pada pengalokasian dana desa untuk program-program pemerintah yang juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan. BUMDes didirikan berasal dari dana desa. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dengan luasnya lingkup kewenangan desa dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga, dari Peraturan Pemerintah BUMDes sebagai lembaga ekonomi rakyat yang juga menjadi pilar demokrasi. BUMDes yang diciptakan dengan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha.

Kondisi ekonomi di Desa Marihat Huta sebelum diterapkannya BUMDes masih dikatakan belum sejahtera hal itu bisa dilihat karena sebagian besar

masyarakat desa sumber pendapatannya dari pertanian. Di Desa Marihat Huta sumber pendapatan yang paling banyak adalah bertani seperti petani padi, petani jagung, dan petani sayur-sayuran. Desa ini merupakan salah satu desa yang memproduksi padi darat dan padi sawah dan masyarakatnya menggantungkan aktivitas ekonominya dari kegiatan usaha tani. Dalam kegiatan usaha tani pendapatan dari masyarakat desa belum bisa dikatakan sejahtera karena tergantung dari hasil panen yang didapat oleh masyarakat, yang dimana hasil panennya tidak menentu dikarenakan cuaca atau kondisi alam lainnya. Seiring berjalannya waktu BUMDes di Desa Marihat Huta mulai di bentuk dan di kembangkan hingga sebagian besar yang pendapatannya bersumber dari Pertanian terbantu, karena masyarakat dibantu dan/atau diberi modal dalam mengembangkan usaha tani untuk membantu menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat. Jenis-jenis BUMDes yang ada di Desa Marihat Huta yaitu usaha pertanian, dan peternakan. Namun, usaha yang paling jelas usaha pengelolaan sampah menjadi kompos, dan direncanakan di tahun 2021 akan dibuat usaha simpan pinjam.

Pengaturan BUMDes diatur dalam pasal 23 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Kesejahteraan masyarakat tidak saja dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan namun secara umum kesejahteraan dilihat dari tingkat pendapatan, pendapatan adalah faktor utama masyarakat dikatakan sejahtera. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin sejahtera tingkat kehidupan dari seseorang tersebut baik dikarenakan pengaruh BUMDes yang ada di desa tersebut atau dikarenakan potensi dari diri sendiri yang mau berkembang.

Salah satu upaya mempercepat pemberdayaan masyarakat adalah melalui peningkatan perekonomian desa yang mendorong pemerintah dan masyarakat desa mengembangkan suatu unit usaha yang berfungsi sebagai sumber penggerak perekonomian desa, salah satunya melalui pendirian Badan Usaha Milik desa (BUMDes). Dalam penelitian ini yang menjadi point penting yaitu bagaimana memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Marihat Huta melalui pembentukan BUMDes menggunakan pemanfaatan dana desa. Pada umumnya permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan pedesaan adalah kualitas sumber daya manusia. Disini akan dijelaskan tentang dana desa telah berkontribusi dalam pembangunan BUMDes di Desa Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan yang dianggarkan untuk biaya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana produksi usaha Pertanian/Peternakan/Perikanan.

BUMDes yang didefinisikan pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa sebagai : *“Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui*

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa". BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di Desa. Kesejahteraan Hidup merupakan dambaan setiap manusia yang tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan bentuk ketidaksejahteraan yang dapat membuat pemenuhan kebutuhan ekonomi jauh dari kata cukup.

Desa Marihat Huta adalah Desa yang berada di Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun. Masyarakat Di Desa Marihat Huta Mayoritas penghasilannya bersumber dari Petani dan Peternak. Hal ini berarti bahwa tingkat ekonomi masyarakat masih bisa dikatakan rendah karena tingkat pendapatan yang tidak pasti, hanya ditentukan dengan hasil panen yang terkadang tidak bisa memenuhi kebutuhan. Hal tersebut tentu menghambat pertumbuhan perekonomian Desa. Oleh karena itu, upaya pemerintah sangat diperlukan untuk membantu perekonomian masyarakat desa melalui bantuan-bantuan kepala desa, namun tersebut pada umumnya hanya berbentuk bantuan yang bersifat langsung dalam artian berbentuk beras, atau uang tunai yang langsung habis dikonsumsi saja tidak berbentuk modal usaha atau modal keterampilan untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa tersebut justru hanya menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di Pedesaan yang mengakibatkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan hal diatas maka sudah seharusnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi. BUMDes lahir sebagai pendekatan baru dalam usaha meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap bersandar pada pengembangan potensi asli desa.

Pemerintah Desa sebagai pengawas dari seluruh kegiatan terhadap BUMDes harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan agar semua kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait. peranan BUMDes bagi masyarakat terutama dalam pembangunan BUMDes secara optimal. Berdasarkan uraian diatas, peneliti telah menetapkan judul penelitian yaitu **Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Nagori Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan.**

1.2.Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peranan BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan program BUMDes di desa Marihat Huta?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Marihat Huta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat BUMDes di desa Marihat Huta?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian adalah :

1. Bagi lokasi penelitian, sebagai saran dan masukan pemikiran yang bermanfaat bagi desa
2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran Ilmiah dan tambahan informasi bagi para mahasiswa dalam melakukan penelitian

3. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengetahui peranan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kelembagaan

Menurut Veblen, kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subjek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Dengan demikian kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu.

Menurut pandangan ahli kelembagaan rentang alternatif manusia ditentukan melalui struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada dikelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.

2.1.2 Kemiskinan

2.1.2.1 Defenisi Kemiskinan

Menurut Mudjarat Kuncoro, kemiskinan didefenisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standard hidup minimum, dimana pengukuran

kemiskinan didasarkan pada konsumsi, berdasarkan konsumsi ini garis kemiskinan terdiri dari 2 unsur yaitu:

1. pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standard gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya
2. jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pengertian Kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara.

Menurut Sharp terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

2.1.2.2. Jenis-jenis Kemiskinan

Kemiskinan menurut Arsyad, (2010) dalam Ayu dan Ayu (2012) kemiskinan dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dari pendapatan untuk mencukupi fasilitas umum atau kebutuhan dasar kebutuhan pokoknya, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan untuk mencukupi hidupnya.
- b. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya. Atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar.

2.1.2.3. Penyebab Kemiskinan

Menurut Suwadi (2014 :25) Kemiskinan disebabkan oleh dua hal antara lain yang pertama kemiskinan disebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku masyarakat atau seseorang yaitu :

- a. Keterbatasan sumber daya modal, keterbatasan sumber daya manusia dapat diartikan kualitas sumber daya manusia misalkan keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan
- b. Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk dijangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju.

Yang kedua yaitu kemiskinan yang disebabkan karena kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah, dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu :

- a. Pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan atau wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau.
- b. Adanya ketimpangan antara pembangunan di wilayah desa maupun kota

- c. Kurang memperhatikan usaha maupun produk masyarakat yang berskala kecil atau usaha mikro ekonomi

2.1.3 Kesejahteraan

kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Menurut Reid dalam Adi (2012:39) mengatakan bahwa “Kesejahteraan sosial barangkali yang terbaik dipahami sebagai suatu ide atau gambaran, yaitu gambaran tentang suatu masyarakat yang baik, yang memberikan kesempatan-kesempatan untuk kerja dan arti manusia, memberikan keamanan yang layak dari kekurangan atau kemiskinan dan serangan, meningkatkan keadilan dan evaluasi berdasarkan jasa individu, dan yang secara ekonomi produktif dan stabil”.

Friedlander dalam Fahrudin (2012 : 9) berpendapat bahwa kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka.

Kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan pelayanan sosial. Pelayanan adalah implementasi dari kebijakan yang diambil oleh pelaksanaan negara guna mencapai tujuan kesejahteraan.

Midgley dalam Adi (2012:104) mengatakan bahwa konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* digunakan untuk menyatakan suatu negara yang pemerintahnya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang luas kepada warga negaranya. Konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan

sosial (*policy social*) yang mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

Adi (2013), menyatakan bahwa beberapa parameter umum yang sesuai dengan kondisi Indonesia yang dipertimbangkan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat antara lain adalah parameter ekonomi, perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, spritualitas, rekreasional, dan jaminan sosial.

Teori kesejahteraan dengan pendekatan kapabilitas sejalan dengan konsep keberdayaan. Menurut Mardikanto dan Soebianto (2015) dalam pemberdayaan terdapat proses peningkatan kemampuan (kapabilitas) dan sikap kemandirian masyarakat dalam memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat. Kapabilitas dapat pula dimaknai sebagai keberdayaan individu atau organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupannya.

2.1.4 Otonomi Desa

2.1.4.1 Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Desa punya tiga unsur yakni :

- Daerah, yang dimaksud daerah dalam arti yaitu tanah-tanah yang produktif dan tanah yang tidak. Juga penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat
- Penduduk, yaitu meliputi jumlah rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan kualitas penduduknya.
- Tata kehidupan desa yang berkaitan erat dengan norma, adat isitiadat dan aspek budaya lainnya yang berlaku.

Didalam Desa ada Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Ciri-ciri Desa dari masyarakatnya. Berikut ciri-ciri masyarakat desa:

- a. Pekerjaan bersifat homogeny atau sama. Masyarakat desa lebih banyak bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan
- b. Masyarakat berukuran kecil. Jumlah penduduknya tidak sebanyak di Kota. Pertumbuhannya juga tidak massif. Ini dikarenakan penduduk desa harus mempertimbangkan keseimbangan potensi alam
- c. Kepadatan penduduk tergolong rendah. Rasio antara luas wilayah dengan penduduknya kecil. Ini bisa terlihat dari rumah di desa yang masih punya pekarangan dan tidak menempel dengan tetangganya.

- d. Lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya masih terjaga dengan baik
- e. Diferensiasi sosial rendah. Tak banyak perbedaan antara warga satu dengan lainnya. Penduduknya punya kesamaan dalam hal Pekerjaan, Adat Istiadat, Bahasa bahkan hubungan Keekerabatan
- f. Stratifikasi sosial yang tidak terlalu mencolok. Kelas atau tingkatan sosial masyarakat desa tidak terlalu banyak dan lebar
- g. Mobilitas sosial masyarakat relative rendah. Pekerjaan dan ikatan masyarakat yang terbatas membuat masyarakat desa tak butuh kerap bepergian
- h. Interaksi sosial pada masyarakat pedesaan sangat kuat. Ini karena mereka punya kesamaan ciri, sosial, ekonomi, budaya, dan tujuan hidup
- i. Kontrol sosial masyarakat pedesaan dilakukan lewat norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Ada sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar
- j. Tradisi lokal masyarakat desa masih kuat. Tradisi diturunkan dari generasi ke generasi

2.1.4.2 Konsep Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa

dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum, publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan demikian, desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan transisi dari desa seragam yang diciptakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan sekaligus memberi landasan yang kuat bagi terwujudnya “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah akan tetapi justru sebaliknya desa merupakan “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan sendiri untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung urgensi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti telah melakukan studi penelitian terdahulu yang relevan terhadap topic penelitian yang disusun oleh peneliti. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani dengan judul peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara pada tahun 2019 melalui metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

yang pada kesimpulannya menjelaskan peran BUMDes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Tibubeneng dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hasil penelitiannya Ni Luh melihat peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui unit-unit usaha yang dikelola dibawah BUMDes dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Faktor-faktor pendukung BUMDes adalah potensi berkembangnya desa di sektor ekonomi cukup tinggi karena terletak di daerah Kuta Utara yang memiliki potensi perkembangan pariwisata yang cukup baik dan sumber daya manusia yang mendukung, faktor penghambat BUMDes belum maksimal memberikan sosialisasi program BUMDes di masyarakat sehingga belum maksimal dalam mendukung program BUMDes, memerlukan dukungan seluruh unsur masyarakat baik adat maupun dinas, SDM potensial yang dimiliki desa lebih memilih bekerja di instansi lain.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian ini dengan penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini membahas sama dengan penelitian yang penulis lakukan yang dimana peranan BUMDes dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang diambil oleh penulis terletak pada fokusnya, penelitian ini lebih berfokus kepada faktor-faktor

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan unit usaha BUMDes. Faktor penghambat dalam penelitian Ni Luh Putu Sri Pradnyani hanya kurangnya sosialisasi namun sumber daya manusia nya sudah cukup efisien dan mendukung, sedangkan dalam penelitian penulis faktor penghambat nya masih kurangnya SDM dan pembinaan ataupun sosialisasi kepada masyarakat.

2. Hasil penelitian yang telah dilakukan Hirda Hastani Barti dan Maswar Patuh Priyadi dengan judul Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2020 melalui metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Analisis yang pada kesimpulannya menjelaskan pengoptimalan penggunaan dana desa terhadap pembangunan BUMDes untuk menuju desa mandiri pada Desa Kalikatur, dan faktor yang menghambat dan mendukung dalam mengetahui potensi unit desa baru dan lapangan pekerjaan yang tercipta bagi masyarakat Desa Kalikatur dengan pengembangan BUMDes, dan pengembangan BUMDes dalam pelaksanaannya sudah optimal atau belum. Dalam hasil penelitiannya dana desa selama tahun 2015-2019 realisasi dana desa belum optimal pada tahun 2017 dan tahun 2018, optimalisasi dana desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa mampu meningkatkan pendapatan asli Desa, pendapatan asli desa turun pada tahun 2017, faktor pendukung dalam optimalisasi dana desa, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, tingginya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa,

faktor penghambat dalam optimalisasi dana desa: musibah banjir bandang yang terjadi pada tahun 2017, keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa.

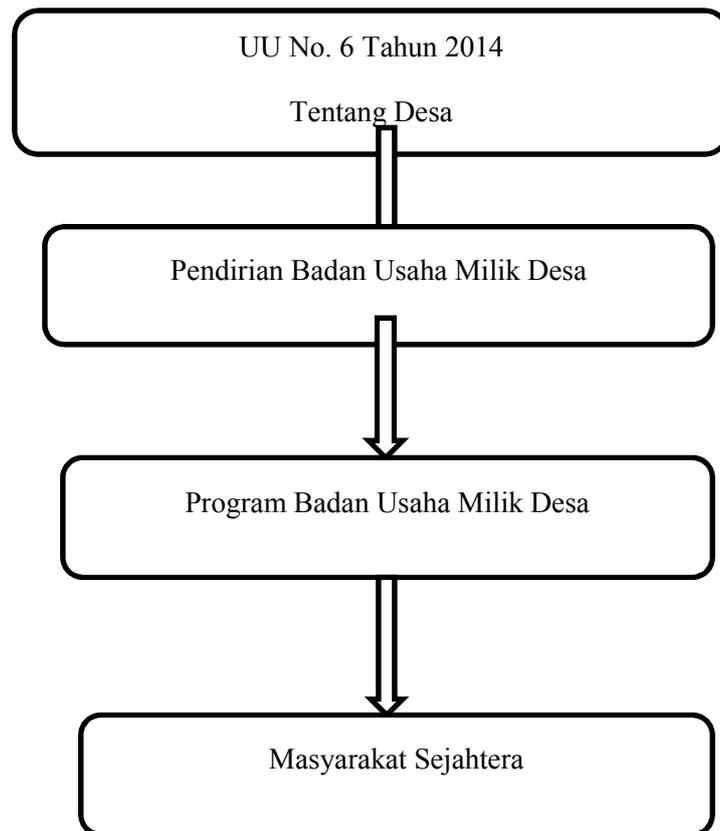
Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang diambil oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sama-sama membahas tentang bagaimana mengembangkan BUMDes.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang diambil oleh penulis yaitu penelitian ini fokus kepada penggunaan dana desa dalam pengembangan BUMDes apakah penggunaan dana desa sudah efektif atau tidak, dan dalam penelitian penulis fokus kepada peranan BUMDes didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apakah sudah efektif atau belum.

2.3. Kerangka Berpikir Penelitian

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Dari kerangka berpikir diatas, penulis menyimpulkan bahwa: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi kerangka utama dalam penelitian ini, yang didalamnya bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan kepentingan masyarakat untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adanya UU No.6 tahun 2014 dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Adapun program-program yang dilakukan

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendirian BUMDes, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Setelah adanya BUMDes mulai ada perubahan, pengembangan BUMDes di pedesaan telah membuka peluang usaha bagi masyarakat, lebih dari setengah masyarakat yang pendapatannya berasal dari pertanian akan terbantu, ditambah pemerintah desa ikut berpartisipasi dalam memberi modal kepada petani dalam mengembangkan usaha taninya, dengan demikian kondisi ekonomi meningkat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, karena salah satu indikator kesejahteraan adalah pendapatan yang semakin meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang ingin diteliti. Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan dan melukiskan sesuatu hal yang didapat dari lapangan dan kemudian menjelaskannya dengan kata-kata. Menurut pendapat Denzin dan Lincoln dalam Moelong (2017:5) mengatakan bahwa “Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Melalui penelitian deskriptif, penulis ingin membuat gambaran secara menyeluruh tentang peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Marihat huta.

3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Marihat Huta. Penulis mengambil Instansi tersebut dikarenakan ketertarikan penulis melihat bagaimana peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa.

3.3. Informan Penelitian

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti ditempat penelitian diantaranya :

1. Informan Kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Kepala Desa)
2. Informan Utama, merupakan yang terlibat langsung dalam keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (sekretaris dan bendahara BUMDes)
3. Informan Tambahan, merupakan masyarakat yang ikut bergabung dalam BUMDes, masyarakat yang sudah pernah bergabung dalam program BUMDes (sudah tidak ikut bergabung), dan masyarakat yang sudah lama menetap di desa Marihat Huta

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam wawancara dalam kelompok tertentu yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok.
2. Dokumentasi, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya: Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat misalnya, jurnal)
3. Materi audio dan visual kualitatif. Data ini bisa berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.

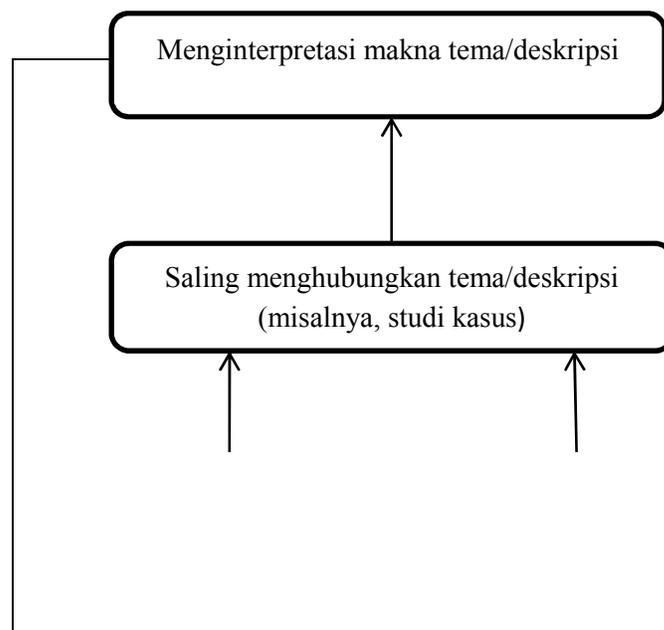
3.5. Analisis Data

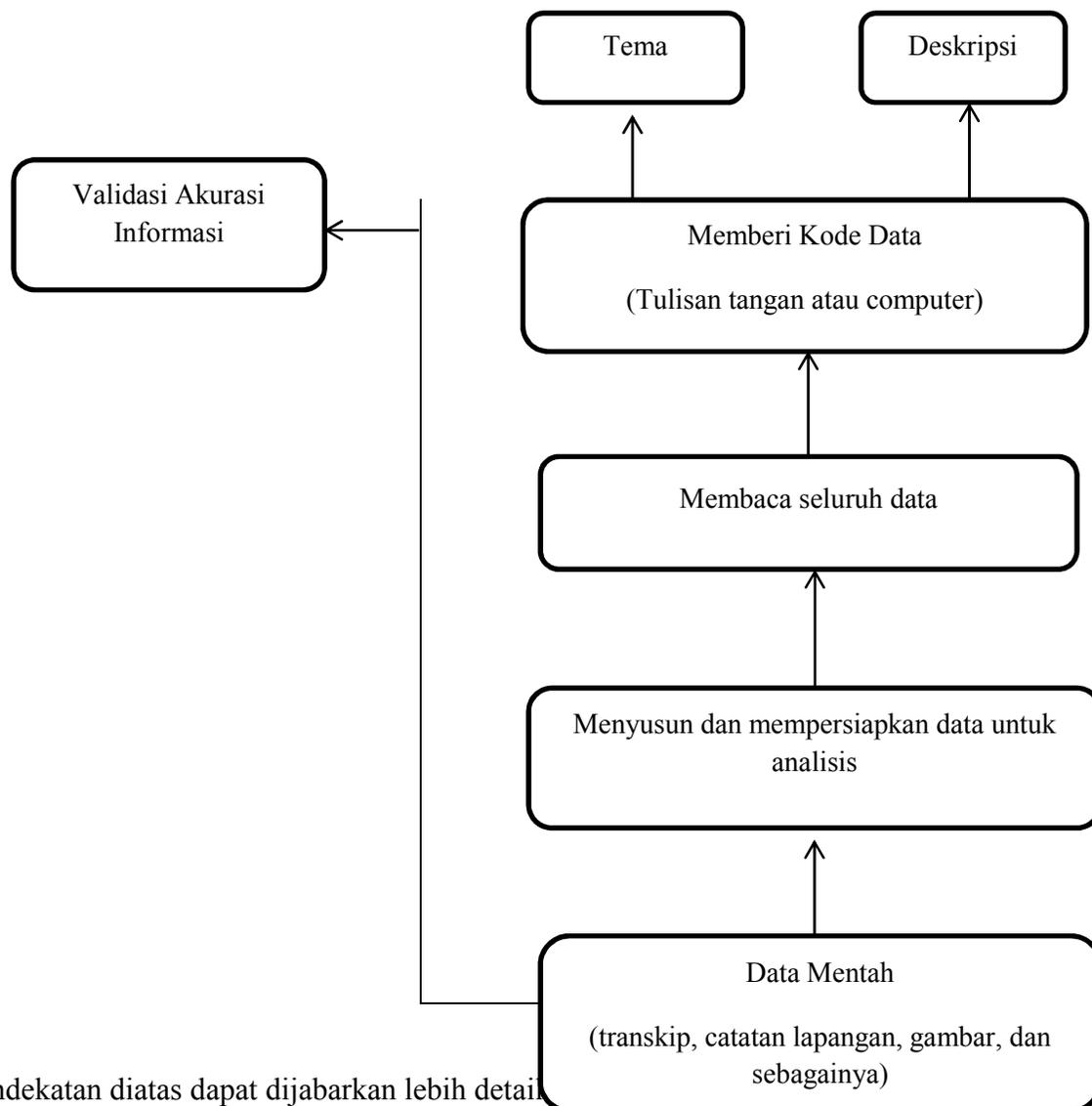
Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung, misalnya, peneliti dapat menganalisis memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir.

Teknik Analisa Data menurut John W. Creswell

Gambar 3.1.

Teknik Analisis Data





Pendekatan diatas dapat dijabarkan lebih detail

Langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan , transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

Langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

Langkah 3. Memulai coding semua data. Coding merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan dan menuliskan kategori dalam batas-batas. Langkah ini

melibatkan pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat atau gambar tersebut ke dalam kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan

Langkah 4. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang, kategori, dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam ranah tertentu. Peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif.

Langkah 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis.

Langkah 6. Pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data.